

Urgensi POKJA Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual

Di Lingkungan Pengawas Pemilu di Provinsi Sulawesi Selatan

Kekerasan seksual terjadi di berbagai lingkungan kerja termasuk di lingkungan penyelenggara pemilu khususnya Pengawas Pemilu. Pemilu 2024, tercatat 4 kasus, salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah Kasus yang melibatkan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan tentu saja masih beberapa kasus lain yang melibatkan para penyelenggara pemilu. Kasus tersebut sebagian telah ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, inklusi dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan pengawas pemilihan umum, Bawaslu Provinsi melakukan kegiatan Pertemuan dengan agenda Diseminasi dan penguatan Kompetensi Teknis Penegakan, pencegahan serta penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawa pemilu umum, pada senin, 28 September 2026 bertempat di Aula Sidang Nur Mutmainnah Bawaslu Provinsi Sulsel.

Kegiatan ini bertujuan menindaklanjuti Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum. Salah satu point penting dari keputusan ini, dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan Seksual di lingkungan pengawas pemilu maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten /Kota membentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang memiliki setidaknya 9 tugas salah satunya melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan penyelenggara pemilu.

Untuk mendapatkan saran dan masukan terkait teknis pembentukan Kelompok Kerja, Bawaslu provinsi mengundang 20 peserta yang berasal dari akademisi, organisasi penggiat pemilu, jurnalis dan organisasi yang koncern pada isu perlindungan perempuan dan anak. Beberapa hal yang menjadi pembicaraan alot dalam pertemuan tersebut adalah walaupun sudah ada pedoman yang Bawaslu Pusat terkait teknis pembentukan POKJA, perlu menelaah betul bagaimana melibatkan semua unsur di Bawaslu (komisioner dan Tim Sekretariat Bawaslu) dalam proses pemebentukan POKJA ini.” Perlu dipertegas secara detail siapa yang dimaksud Bawaslu, komisioner dan tim sekretariat, agar terjadi senergi yang efektif, ” ujar Mulyadi Prayitno perwakilan YKPM.

Selanjutnya, Salam Tadjang dari LSKP menyampaikan bahwa masalah Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang berbasis gender, dimana tidak semua orang terutama kalau dia adalah korban dapat melaporkan secara formal,karena itu salah satu tugas dari POKJA nanti adalah membuka Hotline atau membuat email yang dimana petugasnya dapata menjaga kerahasiaan pelapor.

Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel berharap, agar POKJA dapat terbentuk segera dapat bekerja sehingga ke depan dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan penyelenggara pemilu khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. (Salma Tadjang/28/9/2026)

